

## Analisis Disparitas Pembangunan di Provinsi Riau

Sinta Yulyanti<sup>1)</sup> dan Poppy Camenia Jamil<sup>2)</sup>

### INFO ARTIKEL

#### Penulis:

<sup>1</sup>Universitas Islam Riau

\*E-mail:

[sintayulyanti@eco.uir.ac.id](mailto:sintayulyanti@eco.uir.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Riau

\*E-mail:

[poppycameniajamil@eco.uir.ac.id](mailto:poppycameniajamil@eco.uir.ac.id)

#### Untuk mengutip artikel ini:

Yulyanti, Sinta dan Poppy Camenia Jamil. 2021. Analisis Disparitas Pembangunan di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 32, No. 2 (2021). Hal 108-115.

#### Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

[kiat@jurnal.uir.ac.id](mailto:kiat@jurnal.uir.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat disparitas pembangunan antar daerah di Provinsi Riau pada tahun 2010-2018. Penelitian menggunakan data sekunder, Time Series dari tahun 2010 - 2018. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Williamson, menggunakan data PDRB perkapita suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dengan mempertimbangkan Angka Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Riau. Model ini cukup representatif dalam mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antara wilayah. Hasilnya diketahui bahwa beberapa daerah di wilayah provinsi Riau mengalami disparitas atau ketimpangan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya kontur geografis, sistem administratif wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lainnya.

*This study aims to analyze the level of development disparity between regions in Riau Province in 2010-2018. This study uses secondary data, Time Series from 2010 - 2018. This study uses the Williamson Index method, using per capita GRDP data for an area, the Human Development Index, taking into account the Life Expectancy and Average Years of Schooling in Riau Province. This model is quite representative in measuring the level of development inequality between regions. As a result, it is known that several regions in the Riau province experience disparities or inequality in development. This can be caused by various factors including geographical contours, regional administrative systems, socio-economic conditions of the community and others.*

**Kata Kunci:** Kepribadian, Kompetensi, Kinerja Karyawan

### 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses masyarakat dan sistem sosial ekonomi untuk menuju ke arah yang lebih baik, Widodo (2006). Provinsi Riau merupakan provinsi yang menghasilkan sumberdaya alam yang besar di Indonesia dalam sektor migas dan hasil perkebunan yang berupa sawit, karet dan yang lainnya. Sentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat pada jaman orde baru ternyata berdampak serius pada sektor pembangunan di daerah (safrizal 2008) yaitu proses pembangunan daerah menjadi tidak efisien dan menyebabkan

ketimpangan pembangunan wilayah yang sangat besar, keadaan tersebut disebabkan karena adanya keseragaan pengambilan kebijakan tentang permasalahan yang dihadapi di seluruh daerah begitu juga sistem pembangunan sentralisasi menimbulkan ketidakadilan dalam alokasi sumberdaya nasional terutama dana pembangunan.

Ketimpangan pembangunan suatu daerah merupakan hal yang umum terjadi, ketimpangan tersebut dikarenakan oleh sumberdaya alam dan keadaan geografis setiap daerah yang berbeda-beda, sehingga suatu daerah ada yang maju (*Development Region*) dan ada yang terbelakang

(*Underdevelopment Region*) implikasinya terhadap tingkat kesejahteraan masing masing daerah, hal tersebut berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (Sjafrial, 2008:104).

Provinsi Riau memiliki luas sebesar 87.023,66 km<sup>2</sup> dengan dua belas kabupaten dan kota. Provinsi Riau memiliki sumber daya alam yang sangat mumpuni yaitu berupa migas serta emas, begitu juga hasil hutan dan perkebunan. Undang – undang Otonomi Daerah Provinsi Riau menerapkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 sebesar 6.814.909 juta jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak pada kota pekanbaru sebesar 1.117.359 juta jiwa dan jumlah penduduk yang terkecil pada kabupaten meranti sebesar 184.372 juta jiwa.

Luas nya wilayah administratif Provinsi Riau menimbulkan pertanyaan apakah keseluruhan wilayah berada dalam level pembangunan yang sama atau terdapat ketimpangan pembangunan. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan hal tersebut menggunakan metode indeks Williamson. Tahapan pengolahan dan analisis data akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## 2. Tinjauan Teoritis

W.W Rosow mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Selanjutnya Todaro mengatakan ada 3 nilai pokok untuk keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu pertama, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*) yang berkembang, pengakuan diri

(*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, kemampuan masyarakat untuk memiliki (*freedom from servitude*).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada. Serta membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada kebijakan pembangunan berdasarkan cirikas (*unique value*) dari daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).

Disparitas pembangunan merupakan ketimpangan pembangunan antar daerah dilihat melalui adanya perbedaan tingkat pembangunan antar daerah ada yang sudah mencapai daerah yang maju dan sebaliknya ketika yang lain sudah maju ada beberapa daerah yang masih sangat minim tingkat pembangunannya atau sampai mengalami kemunduran ( Arsyad,2010). Menurut Daryanto 2003 disparitas atau kesenjangan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan aspek pendapatan perkapita, kualitas sumberdaya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, pelayanan dan akses perbankan.

Faktor penyebab ketimpangan daerah atau antar wilayah sebagai mana yang dikemukakan oleh Faisal (2010;9) diantaranya yaitu :

- a. Faktor geografis, suatu daerah memiliki geografis yang berbeda-beda dengan potensi yang berbeda

- juga, dengan kata lain setiap daerah memiliki karakteristik dan keunikan untuk menjadi perhatian pemerintah dalam hal pengembangan dan pembangunan.
- b. Faktor historis, perkembangan masyarakat dan bentuk kelembagaan atau budaya serta kehidupan peekonomian pada masa lalu merupakan penyebab yang cukup penting terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja.
  - c. Faktor politik, dengan melihat politik para investor akan mempertimbangan untuk menginvestasikan pada suatu daerah.
  - d. Faktor kebijakan, terjadinya kesenjangan antar wilayah bisah diaibatkan oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang sentralistik hampir di semua sektor, lebih menitikberatkan pada pertumbuhan dan membangun pusat-pusat pembangunan di wilayah tertentu menyebabkan kesenjangan yang luar biasa antar daerah.
  - e. Faktor administrasi, kesenjangan wilayah dapat terkadi karena kemampuan pengelola administrasi, wilayah yang dikelola dengan administrasi yang baik cenderung lebih maju.
  - f. Faktor sosial masyarakat dengan kepercayaan-kepercayaan primitive, Kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang cenderung konservatif dan menghambat perkembangan ekonomi, sebaiknya masyarakat yang relatif maju umumnya memiliki inensitas dan perilaku yang kondusif untuk berkebang.
  - g. Faktor ekonomi penyebab kesenjangan antar daerah :

- 1) Perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi.
- 2) Terkait akumulasi dari berbagai faktor. Konsumsi rendah, tabungan-investasi rendah, standar hidup rendah, pengangguran.
- 3) Kekuatan pasar bebas.
- 4) Terkait dengan distorsi pasar.

### 3. Metode Penelitian

#### Data

Data yang digunakan diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, dengan mempertimbangkan Angka Harapan Hidup dan Rata – Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau dan data lainnya yang terkait, menggunakan data rentang waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai dengan 2018.

#### Indeks Williamson

Menurut Sjafrizal, 1997 Indeks Williamson merupakan metode analisis yang sering digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah atau daerah secara horizontal. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sebagai data dasarnya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Williamson ini akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol . Jika  $V_w$  mendekati angka 0 berarti tidak terjadi ketimpangan atau terjadi pemerataan pembangunan antar daerah, sedangkan  $V_w$  mendekati dengan angka 1, berarti terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah.

#### 4. Hasil Penelitian

Pada Tabel 1 ditampilkan data PDRB Perkapita Provinsi Riau untuk seluruh kabupaten. PDRB Perkapita tertinggi diketahui terdapat di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Kedua kabupaten ini diketahui memiliki sumber daya alam yang baik, perkebunan sawit, minyak dan gas bumi, serta lintas perdagangan antar negara. Aktivitas kegiatan ekonomi yang baik menghasilkan kenaikan PDRB, diketahui bahwa jumlah penduduk di kabupaten ini tidak sepadat kabupaten lain, sehingga nilai

hasil PDRB Perkapitanya cukup tinggi. PDRB Perkapita Ibu kota provinsi Riau, Pekanbaru berada di urutan kedua terendah, walaupun nilai PDRB nya cukup tinggi tetapi karena jumlah penduduk yang juga padat mempengaruhi PDRB Perkapita. Hasil nilai PDRB Perkapita ini sebenarnya juga belum tentu dapat mewakili pendapatan per individu penduduk karena pada kondisi real nya bisa saja terjadi Gap Pendapatan, karena perhitungan PDRB Perkapita dilakukan dengan membagi rata total keseluruhan.

**Tabel 1. Data PDRB Perkapita Per Kabupaten Provinsi Riau**

No.	Kab./ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	KSingingi	56.88	57.18	59.13	60.95	65.45	63.31	65.01	67.20	69.63
2	IHulu	57.18	58.09	60.96	62.76	66.28	62.99	64.02	65.32	66.33
3	IHilir	42.40	43.85	47.03	49.83	53.50	53.89	55.67	57.47	58.79
4	Pelalawan	78.84	80.45	78.06	77.68	77.03	75.00	73.42	72.72	71.85
5	Siak	139.14	133.59	131.15	123.35	120.15	116.55	113.8	111.83	110.15
6	Kampar	54.96	55.22	56.34	57.8	59.26	58.4	58.58	58.91	58.66
7	Rhulu	33.55	34.61	34.91	35.21	35.87	35.12	35.35	35.83	35.91
8	Bengkalis	171.17	178.17	172.39	162.58	158.55	151.98	146.06	141.66	137.62
9	Rhilir	72.24	69.71	69.53	68.58	70.86	69.30	68.79	68.09	66.30
10	KMeranti	49.30	50.85	54.11	56.17	59.97	61.27	62.87	64.55	66.75
11	Pekanbaru	46.45	48.21	50.13	51.10	53.96	55.50	57.20	59.23	60.95
12	Dumai	68.93	69.37	69.64	70.01	71.87	71.83	73.28	75.08	77.52
Rata - Rata		72.59	73.27	73.61	73.00	74.4	72.93	72.84	73.16	73.37

Sumber : Data Olahan Penelitian, 202

Pada tabel 2 ditampilkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dari tahun 2010 hingga 2018. Nilai tertinggi di kota Pekanbaru pada tahun 2018 sebesar 80.66%. Nilai terendah Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2018 terdapat di Kabupaten

Kepulauan Meranti sebesar 65.23%. Nilai rata rata indeks pembangunan manusia meningkat setiap tahun nya untuk keseluruhan kabupaten di Provinsi Riau dengan nilai tertinggi di tahun 2018 sebesar 71.23%.

**Tabel 2. Data IPM Per Kabupaten Provinsi Riau**

No.	Kab./ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ksingingi	65.07	65.72	66.31	66.65	67.47	68.32	68.66	69.53	69.96
2	IHulu	65.10	65.93	66.50	66.68	67.11	68.00	68.67	68.97	69.66
3	IHilir	61.98	62.82	63.04	63.44	63.80	64.80	65.35	66.17	66.51
4	Pelalawan	65.95	66.58	67.25	68.29	68.67	69.82	70.21	70.59	71.44
5	Siak	69.78	70.20	70.45	70.84	71.45	72.17	72.70	73.18	73.73
6	Kampar	68.62	69.64	70.08	70.46	70.72	71.28	71.39	72.19	72.50
7	Rhulu	63.59	64.2	64.99	66.07	67.02	67.29	67.86	68.67	69.36
8	Bengkalis	69.29	69.72	70.26	70.60	70.84	71.29	71.98	72.27	72.94
9	Rhilir	64.13	64.76	65.09	65.46	66.22	66.81	67.52	67.84	68.73
10	Kmeranti	59.71	60.38	61.49	62.53	62.91	63.25	63.9	64.7	65.23
11	Pekanbaru	77.34	77.71	77.94	78.16	78.42	79.32	79.69	80.01	80.66
12	Dumai	69.55	70.43	71.07	71.59	71.86	72.2	72.96	73.46	74.06
Rata - Rata		66.68	67.34	67.87	68.4	68.87	69.55	70.07	70.63	71.23

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, 2018

Perhitungan IPM dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor diantaranya angka harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Pada tabel 3 ditampilkan data Angka Harapan Hidup per kabupaten provinsi Riau, diketahui bahwa hampir di setiap kabupaten rata – rata memberikan nilai 67% - 71%, hal ini mengindikasikan bahwa AHH provinsi Riau hampir seragam atau tidak terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Tabel 4 menampilkan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) provinsi Riau, data RLS merupakan indikator capaian pendidikan menggantikan indikator angka melek huruf yang dianggap tidak relevan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2021). Berdasarkan data RLS diketahui bahwa hampir keseluruhan kabupaten termasuk kota Pekanbaru secara rata – rata penduduk tidak semuanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Bahkan untuk di

beberapa Kabupaten secara rata – rata hanya menamatkan hingga tingkat sekolah dasar. Jika dilihat dari kontur geografis daerah diketahui memang belum keseluruhan kabupaten dapat mendapatkan akses pendidikan dengan nyaman, ada beberapa yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk bersekolah. Tetapi berdasarkan data tetap ada peningkatan setiap tahun menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan juga mengalami peningkatan.

Indeks Williamson adalah metode analisis untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah atau daerah secara horizontal, menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita sebagai data dasarnya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

**Tabel 3. Data Angka Harapan Hidup Per Kabupaten Provinsi Riau**

No.	Kab./ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ksingingi	67.54	67.57	67.61	67.64	67.66	67.86	67.92	67.99	68.17
2	IHulu	69.51	69.53	69.6	69.63	69.64	69.74	69.79	69.83	69.97
3	IHilir	66.26	66.3	66.43	66.5	66.54	66.84	66.95	67.07	67.32
4	Pelalawan	69.46	69.78	69.86	70.04	70.13	70.23	70.39	70.54	70.74
5	Siak	70.31	70.39	70.45	70.51	70.54	70.54	70.59	70.64	70.79
6	Kampar	69.58	69.65	69.72	69.77	69.80	70.00	70.08	70.16	70.35
7	Rhulu	68.33	68.60	68.7	68.85	68.93	69.03	69.17	69.31	69.55
8	Bengkalis	70.32	70.36	70.38	70.38	70.38	70.58	70.63	70.69	70.85
9	Rhilir	68.98	69.07	69.16	69.23	69.27	69.47	69.57	69.66	69.87
10	Kmeranti	66.06	66.17	66.29	66.38	66.42	66.72	66.85	66.99	67.21
11	Pekanbaru	71.42	71.46	71.51	71.54	71.55	71.65	71.70	71.75	71.94
12	Dumai	69.93	69.95	70.02	70.04	70.05	70.25	70.31	70.37	70.55
Rata - Rata		68.98	69.07	69.14	69.21	69.24	69.41	69.5	69.58	69.78

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, 2018

Pada tabel 5 ditampilkan hasil perhitungan Indeks Williamson untuk provinsi Riau. Ketentuan hasil Indeks Williamson adalah jika hasilnya mendekati nol maka dianggap wilayah tersebut tidak terdapat ketimpangan tetapi jika mendekati satu bahkan lebih maka dianggap terdapat ketimpangan. Peneliti memberikan batasan

bahwa nilai  $>0.5$  dianggap mendekati 1, nilai  $<0.5$  dianggap mendekati nol. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa terdapat 5 kabupaten dan satu ibu kota provinsi memberikan hasil nilai mendekati 1 dan  $>1$  sesuai dengan yang di arsir pada tabel 5.

**Tabel 4. Data RLS Per Kabupaten Provinsi Riau**

No.	Kab./ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ksingingi	7.19	7.46	7.68	7.7	8.17	8.18	8.19	8.20	8.31
2	IHulu	7.20	7.31	7.38	7.46	7.55	7.82	7.83	7.89	8.16
3	IHilir	6.54	6.66	6.7	6.74	6.81	6.82	6.94	7.18	7.19
4	Pelalawan	6.94	7.20	7.41	7.74	7.82	8.17	8.18	8.19	8.44
5	Siak	8.6	8.72	8.77	8.81	9.05	9.20	9.21	9.40	9.64
6	Kampar	8.08	8.56	8.59	8.62	8.62	8.84	8.85	9.09	9.10
7	Rhulu	7.18	7.24	7.31	7.38	7.83	7.84	7.97	8.18	8.37
8	Bengkalis	8.14	8.34	8.64	8.76	8.80	8.82	8.83	8.89	9.21
9	Rhilir	7.24	7.30	7.36	7.42	7.62	7.62	7.88	7.89	8.15
10	Kmeranti	6.12	6.27	6.80	7.33	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48
11	Pekanbaru	10.67	10.84	10.88	10.93	10.95	10.97	11.2	11.21	11.22
12	Dumai	9.36	9.42	9.48	9.54	9.56	9.57	9.58	9.67	9.84
Rata - Rata		7.77	7.94	8.08	8.2	8.35	8.44	8.51	8.61	8.76

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, 2018

Pertama daerah yang mengalami disparitas cukup tinggi tetapi kemudian mengalami penurunan, yaitu kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Kota Pekanbaru dimana terdapat ketimpangan pembangunan tetapi terus menurun tiap tahunnya, hal ini dapat di karenakan semakin banyaknya akses transportasi antar kecamatan yang dibuka, sehingga akses untuk kegiatan

ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat menjadi lebih mudah serta pelayanan administrative yang semakin korporatif. Kedua daerah dengan disparitas berfluktuatif, yaitu kabupaten Siak, kabupaten Kampar, dan Rokan Hulu, hal ini dimungkinkan karena faktor geografis, sosial, administrative, dan lainnya.

**Tabel 5. Indeks Williamson Per Kabupaten Provinsi Riau**

No.	Kab./ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ksingingi	0.42	0.43	0.39	0.32	0.03	0.25	0.2	0.15	0.1
2	IHulu	0.46	0.45	0.38	0.31	0.03	0.3	0.26	0.23	0.21
3	IHilir	1.22	1.19	1.06	0.92	0.09	0.74	0.67	0.6	0.56
4	Pelalawan	0.17	0.2	0.12	0.13	0.01	0.06	0.02	0.01	0.05
5	Siak	2.04	1.84	1.75	1.55	0.16	1.35	1.27	1.2	1.14
6	Kampar	0.73	0.74	0.71	0.63	0.07	0.6	0.59	0.59	0.61
7	Rhulu	1.34	1.32	1.33	1.32	0.16	1.35	1.35	1.35	1.37
8	Bengkalis	3.47	3.68	3.44	3.12	0.33	2.71	2.5	2.32	2.16
9	Rhilir	0.01	0.13	0.15	0.16	0.02	0.14	0.15	0.19	0.26
10	Kmeranti	0.49	0.47	0.4	0.34	0.03	0.23	0.2	0.17	0.13
11	Pekanbaru	1.24	1.18	1.1	1.04	0.11	0.83	0.74	0.66	0.59
12	Dumai	0.09	0.1	0.1	0.07	0.01	0.03	0.01	0.05	0.1

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, 2018

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil indeks Williamson diketahui bahwa beberapa daerah di wilayah provinsi Riau mengalami disparitas atau ketimpangan pembangunan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya kontur geografis, sistem administratif wilayah,

kondisi sosial ekonomi masyarakat dan lainnya. Tetapi secara keseluruhan nilai ini menurun setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah dan seluruh pihak terkait memberikan dampak yang cukup signifikan untuk pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Riau.

## Referensi

- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke 5*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Daryanto, A. 2003. Disparitas Pembangunan Perkotaan-Perdesaan, *Agrimedia* 8(2), 30-39.
- Faisal, B. 2010. *Analisis Disparitas Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan*. Tesis Program Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (tidak dipublikasikan).
- Sjafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Jakarta, *Jurnal Buletin Prisma*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Badouse Media. Padang.
- Widodo T. 2006. *Perencanaan Pembangunan Amplikasi Komputer Era Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.